

Civitas akademika Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM
MENGUCAPKAN SELAMAT DAN SUKSES
kepada wisudawan dan wisudawati Periode I Tahun 2018
SEMOGA SUKSES DALAM MERAH MASA DEPAN

Wisudawan/Wisudawati Prodi Ilmu Pemerintahan Periode I Tahun 2018



Mohammad Afrien
201110050311035



Muhamad Zulfariansyah
201310050311014



Harun
201310050311023



Ermin Trisna Ramadhani
201310050311029



Nofia Mutmainah
201310050311045



Intan Dia Prastiti
201310050311070



Septilia Okky Susanti
201310050311074



Muhamad Aulia Wirawan
201310050311074



Rima Nurhayati
201310050311090



Ayu Febriana Angraini
201310050311092



Erma Kodriyati
201310050311097



Meta Rizki Putri Agam Firdaus
201310050311098



Mohammad Jafar Loilatu
201310050311099



Dimas Pratama Putra
201310050311106



Ayu Triningsih
201310050311126



Moh. Ardhi Akbar
201310050311135



Firmansyah Noor Affandi
201310050311156



Ismayani Arahman
201310050311168



Dareva Rindrawati
201310050311173

Pengarah Redaksi : Salahudin
Pemimpin Redaksi : Asep Nurjaman, Tri Sulistyaningsih, Krishno Hadi, Yana S. Hijri
Redaktur Pelaksana : Mohammad Kamil
Tata Usaha dan Dokumentasi : Jainuri, Hevi Kurnia Hardini
Reporter : Achmad Aprianto, Listiana Asworo, Iradhat Taqwa S

Diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMM

Jl. Raya Tlogomas 246 Malang Telp. 0341-466318 Psw.131

Website : pemerintahan.umm.ac.id

Email : ipumm.28@gmail.com; ipemumm86@gmail.com

Redaksi menerima tulisan mahasiswa melalui karya tulis secara bebas, dinamis, dan kreatif.

Penyerahan naskah tulisan dimulai pada acara wisuda sampai dua minggu sebelum wisuda periode berikutnya.



ProdIP News
Program Studi Ilmu Pemerintahan
FISIP-UMM
Strengthening Effective Government



Diterbitkan Oleh Prodi Ilmu Pemerintahan
Website: pemerintahan.umm.ac.id

Edisi I/TH XII/Februari/2018

Salam ProdIP News

**Strengthening Democracy dengan Mengawal
Proses Pilkada Serentak 2018**

Pembaca Prodip News Edisi I 2018 yang budiman. Program Studi Ilmu Pemerintahan UMM bagian dari elemen dalam penguatan demokrasi (*Deepening democracy*) di Indonesia. *Strengthening Effective Government* merupakan komitmen Prodi Ilmu Pemerintahan UMM dalam mendukung Pemerintahan baik Lokal maupun nasional. Ritual politik lima tahunan menjadi ruang bagi IP UMM dalam memberikan pemikiran, ide ataupun gagasan demi terwujudnya Demokrasi yang Substantif dan meminimalisir Demokrasi Kulusif.

Sebagai salah satu *stakeholder* yang ikut bertanggungjawab pada keberhasilan proses Pilkada sebagai upaya konsolidasi demokrasi lokal, Prodi IP terlibat dalam beberapa kegiatan elektoral ini khususnya dalam Pilkada Kota Malang. kegiatan tersebut antara lain terlibat sebagai peserta dalam Talk Show Nasional dengan Tema "Politik Itu Cantik" yang diadakan kerjasama oleh Times Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Glutera. Selanjutnya Prodi IP UMM menjadi peserta Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor

Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Prodi IP UMM – sebagai salah satu aktor strategis dalam upaya mengambil bagian memantau proses Pilkada.

Selanjutnya mengingat banyaknya rangkaian kegiatan Prodi IP UMM yang dikemas pada Edisi Pertama tahun 2018 ini, maka beberapa rangkaian kegiatan selama tigabulan (Desember 2017 - Februari 2018) akan disajikan secara berurutan. Diawali dengan keberhasilan Dosen UMM Lolos Hibah DIKTI Tahun ke-3, Program pengabdian IBW Dosen IP UMM, Keterlibatan IP UMM dalam rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018, Talkshow Nasional Bertajuk "Politik Itu Cantik", Aktivitas Magang Mandiri Mahasiswa dan kiprah mahasiswa yang berisikan tulisan opini mahasiswa. []

* Pengarah Redaksi,
dan Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UMM.



Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan UMM
Salahudin, S.IP., M.Si., M.PA

Government Science Activities

Pelantikan Ketua Prodi Baru Ilmu Pemerintahan UMM

Alhamdulillah, pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2018 pukul 09.30 WIB Prodi Ilmu Pemerintahan UMM resmi dipimpin oleh Ketua Prodi yang baru. Proses pelantikan tersebut langsung dipimpin oleh Dekan FISIP UMM, Dr. Rinikso Kartono, M.Si. Terhitung mulai 2018-2021 Prodi IP UMM akan dipimpin oleh Salahudin, S.IP, M.Si, M.PA yang menggantikan Hevi Kurnia Hardini, S.IP, MA.Gov di periode sebelumnya. Pelantikan ini dilakukan satu rangkaian dengan semua Prodi di FISIP UMM, Semua Laboratorium se FISIP UMM, Ketua Pusat Kajian Sosial Politik (PKSP) FISIP UMM, Ketua Pusat Studi Asean dan Ketua Humas FISIP UMM.

Kegiatan ini berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran dosen dan karyawan fakultas FISIP UMM. Sebelum proses pelantikan dimulai terlebih dahulu diawali sarapan bersama



Salahudin, S.IP, M.Si, M.PA saat dilantik sebagai Ketua Prodi IP UMM
Periode 2018-2021 oleh Dekan FISIP UMM Dr. Rinikso Kartono, M.Si

untuk mempererat silaturahmi dan kekompakan keluarga besar FISIP UMM. Dalam sambutannya, Dekan FISIP UMM menekankan mengenai pentingnya komitmen dan tanggungjawab sebagai pemimpin serta perlunya membuat terobosan program yang progresif. Prof. Ishomudin yang didaulat sebagai pemberi nasehat juga menekankan hal yang sama. Harus ada kekompakan, kerja sama, dan keteladanan dalam menjalankan jurusan.

Selama 4 tahun kepemimpinan Salahudin, S.IP, M.Si, M.PA selaku ketua

Pordi Baru IP UMM akan dihadapkan banyak tugas untuk terus mengembangkan Prodi IP UMM sebagai Prodi unggulan. Syaratnya adalah semangat kerja, kepemimpinan yang asertif, kerjasama, kekompakan, inovasi dan dukungan semua pihak impian. []

Dosen IP-UMM Lolos Hibah DIKTI Tahun ke-3

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang berhasil lolos dalam Program hibah bersaing DIKTI untuk pendanaan tahun 2018. Dana Hibah Dikti disediakan oleh Dirjen Dikti untuk dapat dimanfaatkan oleh semua Dosen, baik di PTN maupun PTS, guna melaksanakan kegiatan penelitian (Hibah Penelitian) dan Pengabdian Masyarakat (Hibah Pengabdian Pada Masyarakat/PPM). Program hibah yang berbentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini bersifat *problem solving*, komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan (*sustainable*).

Adapun tema program penelitian dan pengabdian Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM yang lolos adalah program Ipteks bagi Wilyah (IbW) Konservasi dan Wisata Agro di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Program IbW di tahun 2018 ini merupakan program pengabdian tahun ke tiga dari rangkaian pengabdian yang bersifat *multi years*. Merupakan program kerjasama dengan perguruan tinggi lain, yakni Universitas Widyagama Malang sebagai Perguruan Tinggi Mitra.

Lolosnya program IbW Konservasi dan Wisata Agro di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM untuk pendanaan tahun ke tiga setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek tujuan yang telah ditentukan oleh Ditlitabmas Dirjen DIKTI yakni 1) membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi; 2) membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat; dan 3) meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan.

Tujuan Program IbW yang ditentukan oleh Ditlitabmas Dirjen DIKTI ini setidaknya sudah dipenuhi dalam kegiatan program pengabdian pada tahun sebelumnya yang dilaksanakan oleh tim pengabdian. Untuk sekedar diketahui, dipilihnya tema Konservasi dan Revitalisasi Wisata Agro sebagai bentuk program pengabdian berangkat dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota batu dalam mewujudkan visi Kota batu sebagai **Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisata Internasional**. Berdasarkan



Tim pengabdian IbW, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu

hasil observasi permasalahan ini muncul karena pemerintah dihadapkan pada minimnya pemahaman warga tentang konservasi dan pengembangan wisata agro, potensi objek wisata belum dikelola dengan baik, belum optimalnya peran wisata agro dalam pengembangan ekonomi local, belum optimalnya kelembagaan pariwisata berbasis masyarakat lokal serta kurangnya kapasitas dan aksesibilitas infrastruktur dalam menunjang wisata agro.

Solusi untuk menghadapi kendala diatas dirancang dalam rencana kegiatan multi tahun (tiga tahun) pada wilayah IbW, yakni di Kecamatan Bumiaji. Pada tahun pertama, program Ipteks bagi Wilyah (IbW) Konservasi dan Wisata Agro di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu fokus pada upaya penyadaran pada warga tentang pentingnya konservasi dan wisata agro, pembangunan sarana dan prasarana pendukung daya tarik wisata agro serta revitalisasi aksesibilitas wisata agro. Sedangkan pada tahun kedua program IbW berkonsentrasi dalam melakukan Pengembangan potensi fisik melalui pengembangan kawasan budidaya tanaman jamba, kopi, dan kesemek pada lahan perhutani dan warga, Konservasi kawasan berbasis komunitas terutama Kelompok Petani Penyelamat DAS Brantas (KPPDAS) dan Pengelolaan kawasan kritis melalui reboisasi bersama masyarakat sekitar hutan.

Keberhasilan tim IbW dalam menjalankan rencana kegiatan di tahun pertama dan kedua membuahkan hasil dengan dipercayanya tim IbW Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM oleh Dirjen DIKTI untuk melanjutkan rencana kegiatan pengabdian untuk tahun ketiga. Kepercayaan ini dapat dilihat dengan berhasil lolosnya tim IbW Ilmu Pemerintahan UMM dalam Program hibah bersaing DIKTI untuk pendanaan tahun 2018. Pada tahun ketiga ini nantinya tim IbW akan memfokuskan diri dalam pengembangan pusat kegiatan KPPDAS untuk penguatan wisata agro yang meliputi pertanian, perkebunan, dan kehutanan; Penguatan jejaring diantara *stakeholder* yaitu destinasi wisata agro, wisatawan, dan masyarakat lokal; serta peningkatan produktivitas budidaya pertanian, perkebunan dan kehutanan, untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat (apl)

IP UMM TURUT MENGHADIRI PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON WALI KOTA MALANG 2018

Selasa, tanggal 13 Februari 2018 bertempat di Harris Hotel & Convention Malang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang mengadakan Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018. Adapun pasangan yang bertarung adalah M. Anton dan Syamsu Mahmud diusung PKB, Gerindra dan PKS, Ananda Gudban dan Wenedi diusung PDIP, PAN, Hanura, PPP dan Nasdem, serta terakhir Sutiaji dan Sofyan Edi Jarwoko diusung oleh Golkar dan Demokrat. Kegiatan ini turut dihadiri langsung oleh perwakilan Prodi Ilmu Pemerintahan yang diwakili oleh Muhammad Kamil, S.I.P, MA. Ach. Apriyanto Romadhan, M.Si dan Iradhat Taqwa. Sihidi, MA sekaligus mewakili rektor UMM Malang. Kegiatan ini berlangsung sangat meriah dimulai jam 18.00 WIB sampai 22.00 WIB. Peserta yang hadir beragam mulai dari KPU Kota Malang, Panwaslu Kota Malang, Dandim Kota Malang, Kapolres Kota Malang, Muspida Kota Malang, para kandidat beserta simpatisannya, awak media, akademisi, LSM, tokoh masyarakat dan masyarakat biasa.

Kemeriahan kegiatan ini begitu terasa sejak di acara belum dimulai. Di loby hall tim sukses dan simpatisan telah berkumpul rapi, memeragakan slogan, meneriakkan yel-yel dan dukungan pada kandidatnya masing-masing. Pasangan M. Anton dan Syamsu Mahmud memiliki slogan "Asik" yang artinya Anton Syamsul Idola Kita, Ananda Gudban dan Wenedi memiliki slogan "Ayo Noto Malang, dan Sutiaji dan Sofyan dengan slogan Malang Sae. Peragaan seperti ini terus berlangsung sampai acara selesai. Wajah kegembiraan dan optimisme terlihat jelas diraut wajah mereka. Meskipun berbeda pilihan interaksi antar mereka berlangsung sangat hangat sehingga kesan pilkada sebagai pesta demokrasi yang penuh kegembiraan begitu nampak.

Semangat itulah yang kemudian ditegaskan oleh Zainudin, ST, M.AP selaku Ketua KPU Kota Malang dalam sambutannya. Pilkada adalah pesta demokrasi sehingga yang harus ditonjolkan adalah antusiasme dan keceriaan. Berpolitik itu harus bahagia sehingga tidak



Muhammad Kamil, S.I.P, MA mewakili Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan UMM dalam Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota Malang

menimbulkan perpecahan. Kompetisi politik wajib menjual program, menghindari kampanye hitam dan sara. Pilkada idealnya menjadi sarana mewujudkan kebaikan bersama bukan justru sebaliknya. Diakhir sambutannya Zainudin meminta agar semua warga Kota Malang yang memiliki hak pilih untuk berpartisipasi pada pencoblosan yang akan diadakan pada tanggal 27 Juni 2017. Kampanye untuk menggairahkan minat partisipasi masyarakat itu dituangkan dalam jingle Pilkada Kota Malang 2017 yakni "Gak Nyoblos Ga Mbois Ker" yang artinya kalau tidak mencoblos anda tidak keren.

Puncak acara kegiatan ini berlangsung sekitar pukul 20.45 WIB. Diawali oleh masing-masing kandidat wakil walikota dipersilahkan untuk mengambil nomor urut yang akan menentukan urutan pengambilan kotak nomor urut yang akan dilakukan langsung oleh calon walikota masing-masing kandidat. Pasangan Ananda Ananda Gudban dan Wenedi memperoleh urutan pertama, disusul M.Anton dan Syamsu Mahmud dan terakhir Sutiaji dan Sofyan Edi Jarwoko. Ketika semua pasangan telah siap di depan kotak pengambilan nomor maka prosesi pengambilan nomor urut pun dilakukan. Masing-masing simpatisan kandidat terus meneriakkan yel-yel dan dukungan untuk mengiringi setiap aktivitas para kandidat. Akhirnya pasangan Pasangan Ananda Ananda Gudban dan Wenedi memperoleh nomor urut 1, M. Anton dan Syamsu Mahmud nomor urut 2 dan Sutiaji dan Sofyan Edi Jarwoko nomor urut 3. Para kandidat terlihat senang dan optimis dengan nomor urutnya masing-masing, pun begitu dengan para simpatisan yang tidak henti-hentinya melakukan aktivitas dukungan baik melalui yel-yel, teriakan maupun visual (gambar). Acara ini sekaligus menjadi rangkaian terakhir sebelum penutup yang menandakan awal kompetisi Pilkada Kota Malang segera dimulai.

Kegiatan ini berlangsung sangat kondusif, selain karena peserta dan tamu undangan yang teratur juga disebabkan pengamanan yang ketat oleh aparat kepolisian dan tentara. Mereka begitu aktif dan cermat dalam memantau dan mengamankan jalannya Rapat Pleno Penentuan Nomor Urut ini. (its)

"Politik Cantik Atau Pecantik Politik?" Memaknai Representasi Perempuan Dalam Kanvas Politik Praktis

Oleh: Listiana Asworo

Menjelang pesta demokrasi lima tahunan, seakan menjadi *alarm* bagi publik untuk kembali mendiskusikan isu-isu yang semula senyap tak bersuara. Seolah-olah hanya ketika ada momentum politik lima tahunan itulah, isu-isu itu hadir dan bergema nyaring. Isu yang sering menjadi perbincangan hangat mengiringi pesta demokrasi itu tak lain adalah soal representasi perempuan. Jika kita hendak mempromosikan demokrasi ramah gender (*gender democracy*), maka elemen yang tak bisa diabaikan adalah representasi politik perempuan itu sendiri.

Hiruk pikuk pesta demokrasi di Indonesia selalu menyuguhkan perjuangan representasi kaum perempuan di ajang politik elektoral. Panggung politik elektoral menjadi salah satu strategi kaum perempuan untuk melakukan advokasi hak-hak perempuan secara intens. Dengan masuk sebagai pembuat kebijakan, maka perempuan akan dengan mudah mempengaruhi kebijakan yang tentunya berpihak pada kaumnya. Jika menggunakan perspektif representasi, maka sudah seharusnya perempuan mewakili perempuan. Dalam bahasa Pitkin, perempuan "*standing for*" perempuan (Pitkin, 1967:60). Bahwa seseorang yang berdiri menjadi wakil, ia merupakan "salinan" atau "cerminan" dari konstituentnya atau pihak yang diwakili. Sehingga, perempuan hadir di parlemen untuk mewakili perempuan itu adalah esensi dari representasi itu sendiri. Bukan representasi formalistik yang digunakan untuk sekedar alat legitimasi.

Sekilas Jejak: Representasi Perempuan dari Waktu ke Waktu

Perjuangan kaum perempuan untuk menggugat konstruksi budaya dan relasi sosial-politik yang diskriminatif dan dominatif telah lama bergaung sejak tiga dasawarsa terakhir. Pasca reformasi, gugatan-gugatan itu semakin nyaring diperjuangkan ketika masih ditemukan potensi-potensi untuk tetap memarjinalkan dan mendominasi perempuan. Meskipun negara kini relatif akomodatif terhadap wacana dan tuntutan keterwakilan perempuan (ditandai dengan UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu), dimana kuota 30 persen perempuan telah diakomodasi oleh negara. Namun, dalam praktiknya ruang ekspresi politik yang diberikan negara dan para elite partai masih jauh dari spirit kesetaraan dan keadilan. Artinya, representasi perempuan berlangsung fluktuatif.

Pelacakan mundur atas fluktuasi representasi perempuan dapat kita mulai dari keterlibatan perempuan dalam kontestasi politik tahun 1950-1955 misalnya, telah berhasil mengakomodasi 9 (3,8%) kursi dari 236 kursi anggota legislatif terpilih saat itu. Jumlah tersebut, kian naik di Pemilu 1955-1960 menjadi 17 (6,3%) kursi dari 272 anggota parlemen yang terpilih. Di era konstituante, perolehan kursi legislatif perempuan turun menjadi 25 (5,1%) dari 488 kursi yang terpilih. Fluktuasi secara kuantitatif tersebut juga terjadi di rezim Orde Baru. Mulai Pemilu pertama Orde Baru (1971-1977) hingga Pemilu terakhir (1999), praksis keterwakilan perempuan di parlemen cenderung pasang surut. Sementara, Pemilu pasca reformasi yakni, tahun 2004, representasi perempuan naik sebesar 11, 5% menjadi 63 legislator dari 550 anggota yang terpilih. Pemilu berikutnya, tahun 2009, berhasil menempatkan 99 (17, 68%) anggota legislatif perempuan dari 560 anggota legislatif yang lolos (Sosdem, 2009:4-6). Artinya bahwa, kuota 30 persen perempuan, mulai era demokrasi terpimpin, rezim Orde Baru berkuasa, hingga bergulirnya reformasi, menemukan hambatan-hambatan yang signifikan dalam upaya penegakkan kuota perempuan.

Mendiskusikan narasi besar demokratisasi dalam perspektif demokrasi ramah gender (*gender democracy*) tidak mungkin bisa mengabaikan elemen penting representasi perempuan. Perempuan memberikan warna tersendiri dalam pertarungan politik di Indonesia. Jika para politisi laki-laki sibuk membicarakan "narasi-narasi besar", sementara kalangan politisi perempuan justru konsisten dan fokus terhadap arah perjuangannya. Sejarah mencatat bahwa perjuangan perempuan dari waktu ke waktu justru semakin menegaskan bahwa perjuangan kaum perempuan telah sampai pada *marwah* nya, tidak sekedar artifisial semata. Porsinya, tanggal 22 Desember 1928, telah terselenggara kongres perempuan pertama kali di Yogyakarta. Agenda pokoknya adalah mengkonsolidasikan kekuatan dan kepentingan perempuan tanpa melihat latar belakang politik, suku, status sosial, ras dan agama (Sosdem, 2009:7).



Para Narasumber saat sedang berbincang terkait representasi perempuan dalam kanvas politik

Ke(tidak)adilan Gender di Indonesia

Perempuan Indonesia selama ini berada dalam "kuasa" kaum laki-laki. Di era demokrasi terpimpin, perempuan justru digunakan sebagai instrument negara. Era pemerintahan Soeharto, perempuan tetap berada pada posisi subordinat, yang hanya digunakan sebagai alat legitimasi pemerintah. Memasuki era reformasi, isu-isu jender kian gigih dibumikan agar menjadi *mainstream* dalam proses pembuatan kebijakan. Akan tetapi, perjuangan, serta kerja keras para politisi perempuan, aktivis perempuan, dan berbagai organisasi perempuan untuk

mewujudkan persamaan hak terus terbentur oleh kultur patriarki dan praktik politik anti representasi (Sosdem, 2009:8). Salah satu penyebabnya adalah, struktur masyarakat yang patriarkis, konstruksi sosial-budaya yang juga kerap memandang perempuan hanya sebagai *konco wingking* (teman di belakang), dan domain perempuan hanya sebatas *kasur, dapur, sumur*. Peyorasi tersebut telah mengkonstruksi dan dirawat oleh masyarakat kita. Sehingga, makna perempuan pun hanya ditempatkan pada komoditas seksual. Pemikiran semacam itu terus menerus diproduksi dan ditularkan ke generasi berikutnya. Negeri ini masih berada di bawah nalar kekokohan dominasi budaya patriarki.

Kaum feminis yang menganut paham pluralisme-demokratis menentang pandangan stereotif yang berpotensi memarjinalkan peran perempuan sebatas fungsi domestiknya, bukan, dalam konteks kehidupan publik yang lebih luas. Pengakuan atas eksistensi keperempuanannya harus didudukkan sebagai hal yang niscaya. Di dunia politik, perempuan harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa dirinya juga memiliki kompetensi dan kapasitas yang sama dengan kaum laki-laki. Hadirnya perempuan di dunia politik diyakini memberikan warna lain dalam percaturan politik Indonesia. Jika dalam nalar maskulinitas, politik itu diibaratkan arogan, culas, dan kotor. Maka, perempuan menawarkan kelembutan, kegesitan, dan konsistensi perjuangan dalam politik.

Seperti yang ditegaskan dalam Talkshow bertema "Politik Itu Cantik". Sebuah acara yang dikemas santai dan ringan ini sarat makna. Acara ini dihadiri oleh perempuan-perempuan hebat yang berkisah di dunia politik. Mereka berada dalam satu suara, bahwa perempuan era modern harus didudukkan sebagai kaum progresif dan produktif dalam bekerja. Kemampuan dan kapasitas yang dimiliki tidak kalah dengan politisi laki-laki. Lebih tegas lagi, Ananda Gudban, calon wali kota Malang, mengatakan bahwa diskusi sekarang sudah *beyond* kesetaraan dan keadilan. Era sekarang adalah bagaimana perempuan dan laki-laki berkompetisi secara *fair*, saling adu kompetensi dan kapasitas, bukan saling serang soal jender. Namun demikian, para politisi perempuan ini meyakini bahwa posisi mereka dalam konteks politik, rentan dari berbagai manipulasi politik dan tak jarang dipakai sebagai alat legitimasi semata.

Perempuan Untuk Kemajuan

Gagasan representasi perempuan dalam politik hadir setidaknya karena empat alasan. *Pertama*, berkenaan dengan keadilan dan kesetaraan yang tertuang dalam konstitusi dan Konferensi Perempuan di Beijing. *Kedua*, terkait *women interest*. Kaum laki-laki harus menyadari bahwa tidak semua kepentingan dapat diwakili. Isu-isu yang sifatnya spesifik perempuan, harus diwakili oleh perempuan sendiri. *Ketiga*, perempuan membuat perbedaan. Harus disadari bahwa politik "maskulinitas" di parlemen hampir selalu dalam konteks "kami" dan "mereka". Sehingga, representasi perempuan dalam parlemen memberikan warna ketika mengambil keputusan-keputusan politik. *Keempat*, pentingnya perempuan menjadi panutan. Perempuan tidak hanya berperan sebagai politisi, tetapi juga sebagai teladan bagi publik seluruhnya (Sosdem, 2009:42).

Kiprah perempuan dalam politik tentunya memberikan warna yang berbeda. Sentuhan femininitas dalam politik menyuguhkan kesejukan dan keoptimisan. Hadirnya perempuan dalam arena politik, membuat politik itu "cantik". Agar tidak hanya menjadi "pecantik" politik, perempuan harus memberikan bukti bahwa dirinya juga memiliki peran dan tanggung jawab yang sama besarnya dengan laki-laki dalam hal memajukan bangsa dan negara. Perempuan tidak hanya sekedar alat legitimasi, bahwa *gender mainstream* telah berlaku di Indonesia, tetapi perempuan ikut terlibat, terjun langsung ke masyarakat dan membantu proses kemajuan negeri. Itulah esensi dari representasi perempuan sesungguhnya. □

Program studi Ilmu Pemerintahan merupakan salah satu prodi di Universitas Muhammadiyah Malang yang fokus pada kajian tata kelola pemerintahan nasional maupun pemerintahan lokal (daerah). Lebih dari itu output mahasiswa yang dihasilkan diuntut mampu secara aplikatif berkontribusi di masyarakat dengan jenis pekerjaan apapun khususnya di birokrasi pemerintahan (birokrat). Dalam konteks perbaikan birokrasi, mahasiswa UMM diharapkan menjadi pioner dalam reformasi birokrasi dengan ide-ide gagasan yang progresif, etos kerja yang tinggi, disiplin dan berintegritas. Guna mewujudkan ide tersebut, Prodi Ilmu Pemerintahan membuat Program Magang Mandiri yang bertujuan agar mahasiswa dapat belajar bagaimana tata kelola pemerintahan dan birokrasi pemerintahan secara langsung, mengimplementasikan teori dan pengetahuan yang sudah didapat saat kuliah serta untuk menambah pengalaman dan wawasan tentang dunia kerja. Waktu pelaksanaannya dilakukan selama 1 bulan yakni 15 Januari-16 Februari 2018 dimana mahasiswa melakukan magang mandiri di instansi pemerintahan, dalam hal ini didaerah asal masing-masing mahasiswa.

Dalam edisi kali ini akan disajikan pengalaman magang yang dilakukan oleh dua mahasiswa yakni Nikmatul Aulia di DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan dan Farida Fauziah di Kantor Kecamatan Pakis Aji.

Secara umum, kegiatan yang kedua mahasiswa lakukan selama menjalankan program magang mandiri hampir sama. Nikmatul Aulia banyak melakukan kegiatan di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kab. Hulu Sungai Tengah dengan lebih banyak membantu staff dalam hal administrasi surat-menyurat, ikut terlibat dalam Rapat Paripurna, Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Badan Musyawarah atau rapat lainnya yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kab. HST sebagai notulen serta membuat laporan dari hasil rapat tersebut, Aulia panggilan akrabnya juga terlibat dalam kajian/kajian terhadap Peraturan Daerah serta terlibat dalam proses Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Selama menjalankan magang, Aulia banyak dibantu dan diajarkan oleh staff dari



Rapat Paripurna Penyampaian Bupati HST terhadap 3 (tiga) buah Raperda Kab. HST Tahun 2018.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sehingga proses adaptasi dan kerja menjadi lebih cepat.

Adapun Farida melakukan kegiatan baik secara administratif dan mengikuti turun lapangan. Kerja-kerja administratif seperti membuat laporan kegiatan Camat mulai Bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember Tahun 2017. Dalam aktivitas turun lapangan, Farida ikut langsung turun lapangan untuk mengikuti beberapa kegiatan seperti Musrenbangdes di beberapa Desa yaitu Wonokerso, Glanggang, dan Permanu, kegiatan ini dilakukan mulai tanggal

23 Januari 2018. Farida juga diberi kesempatan untuk ikut serta dalam mengontrol dan melihat usaha masyarakat di Desa-desa yang sudah berkembang baik dan menghasilkan keuntungan bagiarganya sehingga mengurangi kemiskinan serta pengangguran di Desa. Tidak hanya itu saja, Farida juga diajak langsung untuk mengikuti Rapat Koordinasi (RAKOR) di Kantor Anusapati Kabupaten Malang yang bertemakan tentang "Updating Data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Malang Tahun 2017" yang membahas mengenai Kecamatan serta Desa yang ada di Kabupaten Malang yang dikategorikan sebagai Kecamatan dan Desa yang Maju, Berkembang dan Tertinggal di Tahun 2017. Terakhir, Farida turut ikut serta dalam kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Wanita "Angrek Bulan" Tahun Buku 2017 dan RK-RAPB Tahun 2018 yang diselenggarakan di Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, Rapat tersebut membahas mengenai masalah pinjam meminjam dana untuk Ibu-ibu yang dipergunakan sebagai modal usaha atau kebutuhan rumah tangganya.

Proses magang yang memang terbilang cukup singkat 1 Bulan cukup memberi banyak manfaat buat mahasiswa. Pengalaman langsung bersentuhan dan melakukan kerja-kerja taktis birokrasi memberikan pemahaman nyata tentang bagaimana birokrasi bekerja. Ada kepercayaan diri yang muncul, kedisiplinan yang kuat, kreatifitas dan inovasi yang terasah, motivasi kerja yang stabil, kerjasama yang terwujud, emosi dan etika kerja yang terjaga dan jaringan sosial yang terbentuk. []

PENGEMBANGAN DESA WISATA BUDAYABERBASIS MASYARAKAT DI DUSUN SADE DESA REMBITAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Oleh: Moh Ardhi Akbar

Dunia internasional, mengenal Indonesia sebagai destinasi sejuta wisata dengan keanekaragaman potensi pariwisata yang ada. Potensi pariwisata ini setidaknya dapat di kategorikan dalam dua jenis, yakni wisata alam dan wisata budaya. Wisata alam yang ada di Indonesia terdiri dari wisata laut, air tawar, pegunungan. Adapun wisata budaya yang ada dapat dilihat dari keanekaragaman budaya lokal yang masih kental dari berbagai macam suku, budaya yang ada di daerah Indonesia. Tingginya potensi serta minat wisatawan internasional dan domestik terhadap pariwisata, menjadikan sektor pariwisata memiliki nilai signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja domestik. Di Indonesia pariwisata merupakan penyumbang devisa terbesar setelah ekspor migas. Disamping itu pariwisata memiliki peran yang signifikan dalam penyerapan kesempatan kerja dan pemberdayaan usaha mikro dalam jumlah yang tinggi pada daerah-daerah tujuan wisata. Untuk itu dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik serta untuk arah pengembangan pariwisata maka diperlukan sebuah kerangka hukum yang jelas dalam mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata.

Di Indonesia sendiri, pengembangan pariwisata sesungguhnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa Kepariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Sebagai bagian dari arah pengembangan pariwisata nasional, Pulau



Lombok merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata. Salah satunya adalah wisata budaya yang ada di Dusun Sade desa Rambu. Ditetapkannya Dusun Sade sebagai daerah wisata budaya tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2013-2018 BAB III Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah Bagian Kesatu pasal 13 (1) Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) terdiri dari Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) meliputi Dusun Sade sebagai kawasan wisata budaya.

Dijadikannya Dusun Sade sebagai destinasi wisata budaya karena Dusun Sade merupakan salah satu desa wisata budaya yang masih alami lengkap dengan bangunan adat, serta warisan leluhur yang terus dijaga dan dikembangkan sampai saat ini oleh masyarakat Sade, menjadikan keistimewaan nilai lebih pariwisata bagi Dusun Sade yang patut di pertahankan dan di kembangkan. Sade disebut sebagai Desa Wisata Budaya karena Dusun Sade menawarkan kegiatan wisata yang menekankan pada unsur kebudayaan yang ada di Suku Sasak dan bentuk wisata aktif yang melibatkan wisatawan berhubungan langsung dengan masyarakat Sade dengan menonjolkan kesenian dan kebudayaan sebagai daya tarik wisata di Dusun Sade.

Pengembangan desa wisata budaya Sade menerapkan pariwisata berbasis masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, dengan menggunakan pola pengembangan pariwisata yang mendukung dan memungkinkan keterlibatan masyarakat Sade sepenuhnya dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan usaha pariwisata dan segala keuntungan yang diperoleh. Kegiatan pengembangan potensi dikembangkan berdasarkan prinsip pariwisata

berbasis masyarakat. Secara ideal prinsip pengembangan berfokus pada pembangunan pariwisata "dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat". Memicarakan tentang potensi ada beberapa potensi seni dan budaya yang menjadi daya tarik wisatawan berkunjung ke Dusun Sade antara lain :Rumah Adat, Kerajinan Tenun Ikat, Kerajinan Seni Ukir, Kesenian Peresean, Kesenian Gendang Beleg.

Dari kelima potensi daya tarik wisata budaya yang ada di Sade, dalam pengembangan potensi dilakukan oleh masyarakat dengan kesadaran sendiri dari masyarakat Dusun Sade, dengan seni dan budaya yang sudah melekat dari satu keturunan ke keturunan berikutnya. Oleh karena adanya kreatifitas dan kesadaran untuk menjaga kebudayaan yang mereka punya, Sade menjadi dikenal kalangan wisatawan lokal maupun asing. Jadi kesadaran sendiri dari masyarakat yang mempunyai rasa cinta dengan seni dan budaya yang ada, dengan alasan tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi tapi lebih kepada bagaimana mereka selaku masyarakat yang ada di Sade merasa menjaga dan melestarikan budaya, dengan demikian seiring berjalannya waktu masyarakat akan selalu mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya jangan sampai seiring dengan perkembangan waktu peninggalan-peninggalan seni dan budaya para leluhur luntur, karena seni dan budaya mereka merupakan daya pikat wisata yang harus di pertahankan oleh masyarakat dengan cara memelihara dan di kembangkan.

Keterlibatan masyarakat Sade dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil. Dalam tahap perencanaan keterlibatan masyarakat memberikan sumbangan ide atau gagasan terkait dengan pengembangan desa wisata budaya Dusun Sade. Hasil akhir dari kegiatan diskusi atau musyawarah yang dilaksanakan adalah pembentukan rencana program yang berisi tentang kegiatan pengembangan desa wisata budaya Dusun Sade. Rencana program tersebut berisi antara lain tentang perbaikan infrastruktur kepariwisataan yang dilaksanakan secara gotong-royong oleh masyarakat dan peningkatan peran masyarakat pada pelaksanaan atraksi wisata yang dilaksanakan. Adanya suatu perencanaan pariwisata sangatlah penting karena dengan adanya suatu perencanaan pariwisata program yang baik maka dapat dijadikan sebagai arah suatu pengembangan wisata yang dilaksanakan.

Untuk tahap pelaksanaan semua masyarakat di libatkan dari anak-anak hingga orang tua di ikut sertakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program wisata yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan atraksi wisata, jadi masyarakat terlibat dalam pengelolaan seperti menjadi guide atau pemandu wisata, membuat seni ukir, mengelola kesenian gendang beleg, peresean dilakukan oleh pemuda dan bapak-bapak sedangkan untuk ibu-ibu dan gadis terlibat dalam menenun, berjualan cindramata atau pernak-pernik. Keterlibatan dalam pelatihan atau peningkatan pelayanan wisata yang dilakukan oleh Pokdarwis masyarakat juga selalu ikut berpartisipasi untuk

meningkatkan ilmu kepariwisataan kepada masyarakat yang belum paham dalam pelayanan wisata yang baik dan keterlibatan dalam pengembangan pelayanan aksesibilitas desa wisata bentuk peran aktif dari masyarakat terhadap pengembangan desawisata budaya adalah masyarakat melakukan kegiatan gotong-royong dalam membangun maupun memperbaiki fasilitas dan infrastruktur yang ada pada desa wisata budaya Dusun Sade. Kegiatan ini ditujukan untuk semakin mengembangkan atas adanya desa wisata budaya Dusun Sade.

Sedangkan untuk tahap pemanfaatan hasil ada dua pengambilan manfaat baik dari ekonomidansosialbudayayang berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomimasyarakat sekitar desa wisata budaya Dusun Sade. Untuk manfaat dari segi ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat Sade karena dengan adanya desa wisata budaya di Dusun Sade secara tidak langsung bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Sade dan sekitarnya. karena semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke Sade maka penghasilan mereka pun semakin banyak. Sedangkan manfaat dari sosial budaya adalah lingkungan Dusun Sade menjadi lebih bersih, tertata dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tetap merawat dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar desa wisata budaya Dusun Sade. Manfaat sosial budaya lainnya juga masyarakat jadi lebih menyayangi atau menyukai tradisi seni dan budaya Suku Sasak mulai dari anak-anak hingga orang tua, contoh seperti menenun, membuat seni ukir, memainkan gamelan, peresean, tarian tradisional dengan cara seperti ini jadi masyarakat Dusun Sade akan selalu melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya suku sasak.

Tidak terlepas dari peran masyarakat peran pemerintah juga sangat dibutuhkan dalam pengembangan desa wisata budaya Sade karena pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam pengembangan desa wisata budaya Sade. Sehingga pemerintah juga harus berperan dalam pengembangan desa wisata. Akan tetapi disini peran pemerintah daerah hanya sebagai fasilitator terhadap pengembangan desa wisata Sade karena untuk pengelolaan semuanya di serahkan kepada masyarakat Sade yang mengurus dan mengelola langsung. karena pemerintah Desa Rambu dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Lombok Tengah menganggap Dusun Sade sudah mandiri sehingga tidak terlalu di prioritaskan lagi. Padahal menurunnya peran pemerintah Desa dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lombok Tengah dapat menjadi kendala dalam pengembangan desa wisata Sade.

Namun di dalam pengembangan desa wisata budaya di Sade terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain rendahnya SDM masyarakat Sade di tingkat pendidikan, keterbatasan lahan dalam pengembangan rumah adat, tidak transparansinya pengelola wisata dalam pengelolaan pemasukan dana dan kurangnya peran dan dukungan pemerintah daerah. Sehingga perlu adanya pembenahan-pembenahan pada titik sentral yang menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan desa wisata budaya Sade. []

Opini Mahasiswa

Membaca Indeks Kerawanan Pilkada

Oleh: Mohammad Jafar Loilatu

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Pilkada membuka keran demokrasi dengan menempatkan kedaulatan rakyat dan memberikan partisipasi kepada masyarakat untuk menentukan pemimpin ditingkat lokal. Prinsip demokrasi yang mengedepankan partisipasi ini sering kali disalah gunakan, fatalnya hingga membuat hak pilih lain, tentu bertentangan dengan hak masyarakat yang dilindungi dalam setiap pesta demokrasi baik itu hak untuk bersuara, memilih dan menyatakan pendapat. Mayo (2009) prinsip demokrasi salah satunya adalah *orderly succession of rulers*, untuk menjawab pergantian pemimpin secara teratur dengan mengedepankan nilai-nilai demokrasi, maka pengakuan terhadap hak pilih haruslah diberikan kepada masyarakat, baik secara sosial, politik dan ekonomi. Pengakuan ini untuk menciptakan keteraturan dalam masyarakat agar dapat menghindari potensi konflik.

Pilkada ramai dengan istilah serentak, artinya dilaksanakan secara



bersamaan pada beberapa wilayah yang mengikuti transisi kepemimpinan. Pilkada serentak dimulai pada 2015 gelombang pertama, gelombang kedua 2017. Dapat dicatat terdapat transisi kepemimpinan setiap tahunnya meskipun pada wilayah yang berbeda, kini disusul Pilkada gelombang ketiga 2018, yang mengharuskan perebutan kekuasaan yang terbatas, sehingga menimbulkan potensi konflik.

Konflik pilkada muncul sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap hasil kontestasi. Berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dengan menggunakan kategori kerawanan lima aspek. *Pertama*, profesionalitas penyelenggara. *Kedua*, politik uang. *Ketiga*, akses pengawasan dengan kategori kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur pendukung. *Keempat*, partisipasi masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas pemilu. *Kelima*, keamanan daerah. Untuk mengukur kerawanan Bawaslu memberikan bobot nilai dengan kategori profesionalisme penyelenggara (30%), politik uang (20%), akses pengawasan (15%), partisipasi masyarakat (20%), keamanan daerah (15%). Nilai kerawanan (0-1) sangat aman, (1-2) aman, (2,1-3) cukup aman, (3,1-4) rawan, (4,5-5) sanagarawan.

Berdasarkan Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) tahun 2015 terdapat 32 provinsi yang disurvei oleh Bawaslu tiga diantaranya berada pada kondisi cukup rawan Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara dan

Maluku dengan bobot (2,74), 27 provinsi lainnya berada pada kondisi yang cukup aman dengan bobot nilai yang lebih rendah. Dua provinsi berada pada kondisi aman Kepulauan Bangka Belitung dan Bali (1,84), dengan peserta pilkada tahun 2015 8 provinsi, 170 kabupaten dan 26 kota.

Jika dinilai pada tiap kategori kerawanan Pilkada maka pada kategori profesionalisme menempatkan Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur (3,0) dan Maluku (3,3) posisi ini menunjukkan posisi rawan, diposisi aman terdapat Jambi (1,8), Kalitim (1,6). Kategori politik uang NTT (3,0). Rawan. Gorontalo (2,8), Jambi (2,9), Sulawesi Utara (2,7) dengan cukup aman. Kategori pengawasan Papua dan Kalimantan Utara (3,0) dengan kondisi rawan, kondisi aman Bali (1,2), Jawa Tengah (1,2), Bangka Belitung (1,1). Kategori partisipasi dengan kondisi rawan Riau (3,8), NTT (3,9), Kalimantan Tengah (3,8), DIY (3,7), sedangkan kondisi aman Bangka Belitung (1,1), DIY (1,2), Bali (1,2), Banten (1,2). Kategori keamanan, dengan kondisi cukup aman Jawa barat (1,8), Papua (2,9), kondisi aman ditempatkan oleh Maluku, Maluku Utara dan Lampung dengan nilai (1,0).

Tahun 2017 terdapat 101 wilayah di Indonesia yang menyelenggarakan pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota. Hasil IKP pilkada 2017 untuk tingkat provinsi menunjukkan 3 daerah dengan tingkat kerawanan tinggi secara berurutan Papua Barat (3,38), Aceh (3,32), Banten (3,14). Sementara 4 provinsi lainnya berada pada kategori tingkat kerawanan sedang secara berurutan Sulawesi Barat (2,36), DKI Jakarta (2,29), Kepulauan Bangka Belitung (2,29) dan Gorontalo (2,01)

IKP 2017 tingkat kabupaten/kota menunjukkan ada 4 daerah dengan tingkat kerawanan tinggi yang semuanya berasal dari propinsi Papua, secara berurutan daerah tersebut Tolikara (3,50), Intan Jaya (3,30), Nduga (3,24) dan Lanny Jaya (3,03). Sementara ada 40 kabupaten/kota yang berada pada kategori kerawanan sedang, jika dilihat dari sebaran wilayahnya, dari empat puluh wilayah tersebut didominasi oleh kabupaten/kota dari Papua, Aceh, Papua Barat. Akan tetapi adapula Kabupaten/ kota seperti Takalar (2,88) yang berada di peringkat 7, Kepulauan Mentawai (2,68) di peringkat 8 dan Buton (2,65).

Terakhir Pilkada 2018 mengikutkan 171 wilayah, dengan 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. 17 Provinsi yang ikut pilkada, 3 diantaranya pada posisi rawan, Papua (3,41), Maluku (3,52) dan Kalimantan Barat (3,04). 4 provinsi dengan kerawanan sedang, Sumatra Utara (2,86), Sulawesi Tenggara (2,81), Maluku Utara (2,71), NTT (2,70) Jawa Timur (2,68), Sumatra Selatan (2,55), NTB (2,54), Sulawesi Selatan (2,53), Jawa Barat (2,19), Riau (2,46), Lampung (2,28), Bali (2,19), Jawa Tengah (2,15)

Penulis berupaya untuk menyederhanakan tulisan ini dengan menjelaskan IKP berdasarkan tahun 2015. IKP 2017, penulis menjelaskan berdasarkan bobot penilaian keseluruhan dengan akumulasi penilaian 5 indikator IKP menggunakan perbandingan provinsi dan kabupaten, sama halnya dengan IKP 2018 tetapi hanya menempatkan 17 provinsi yang ikut pilkada tahun 2018.

Melalui tulisan ini penulis ingin mengajak pembaca untuk memahami IKP dan menentukan langkah antisipasi kedepan. Berdasarkan IKP diatas terdapat beberapa provinsi/ kabupaten/kota yang berada di posisi rawan dalam kurun 3 tahun, baik itu dalam kategori ataupun bobot penilaian secara keseluruhan. Contohnya NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Kalimantan Utara, dan Riau. Selanjutnya menentukan langkah antisipasi untuk mengurangi kerawanan konflik, dikarenakan ditahun 2018 pilkada gelombang 3 akan diikuti oleh 17 provinsi diantaranya: Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Barat Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, Maluku Utara, serta 115 kota/kabupaten.

Provinsi yang ikut pilkada gelombang ketiga, adalah provinsi yang rawan konflik, dengan beban tahun 2019 maka eskalasi politik tahun 2018 akan lebih meanas. Untuk itu tulisan ini bukan hanya mengajak membaca kerawanan pilkada tetapi menentukan langkah antisipasi seperti penulis sampaikan diatas, langkah antisipasi dengan berbagai cara, seperti tidak menjadi bagian dari *black campaign*, *money politic*, konflik antar pendukung atau hal lainnya yang dapat meningkatkan kerawanan pilkada. []

Kampung 1000 Topeng

(Studi Tentang Implementasi Kebijakan – Desaku Menanti Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kota Malang)

Oleh: Muhamad Zulfariansyah



Berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Permasalahan yang terjadi dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan yang ada Di Indonesia pada saat ini terkait dengan adanya fakta bahwasanya pertumbuhan ekonomi pada saat ini tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah khususnya Di Indonesia sendiri, dikarenakan dengan tingginya disparitas pendapatan antar daerah.

Berangkat dari masalah kemiskinan diatas, pemerintah Kota Malang memiliki salah satu program dalam pengentasan kemiskinan yang digagas langsung dari Kementrian Sosial oleh ibu Khofifah yaitu program Desaku Menanti. Program ini ditujukan untuk menanggulangi masalah-masalah kemiskinan yang ada di Kota Malang yang menjadi terpadu dan satu dalam program Desaku Menanti.

Program Desaku menanti adalah salah satu program rehabilitasi sosial gelandangan dan juga pengemis yang dilakukan terpadu yang berbasis desa dengan menekankan pengembalian masyarakat ke daerah asalnya. Program Desaku Menanti sangat bermanfaat bagi Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) dikarenakan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membantu memberikan rumah yang layak huni. Selain itu ada juga bantuan berupa penguatan ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Malang. Program ini bekerjasama dengan Pemerintah Kota Malang, khususnya Dinas Sosial agar eks gepeng bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Karena itu, selain diberikan rumah layak, mereka juga diberikan *Vocational Training* serta program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) atau kelompok usaha bersama yang diharapkan agar mereka memiliki sumber income sendiri.

Dalam program ini pemerintah Kota Malang juga menyampaikan bahwa senjata ampuh dalam mengentaskan kemiskinan yaitu dengan memberantas mental miskin dan meningkatkan upaya kolektif masyarakat untuk melepaskan diri dari kemiskinan. Dengan mental antimiskin, orang akan mengukur apakah perlu diberi bantuan atau tidak. Sehingga masyarakat yang selama ini menerima bantuan akan mengalihkan kepada masyarakat-masyarakat lain yang sangat kurang mampu. Dinas Sosial Kota Malang membuat terobosan program baru yang bukan hanya sekedar program melainkan ada *soft campaign*-nya.

Program Desaku Menanti ini dijalankan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sesuai amanat Peraturan

Presiden No.15 tahun 2010. Program Desaku Menanti ini diharapkan mampu menjadi terobosan baru dalam pemecahan permasalahan kemiskinan di era sekarang. Program ini akan berbeda dari program-program pengentasan kemiskinan yang kebanyakan salah sasaran dan menciptakan ketergantungan masyarakat pada pusat ataupun bantuan pihak luar. Dengan melibatkan semua elemen yang ada termasuk masyarakat miskin, program Desaku Menanti diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan juga mengubah perilaku masyarakat miskin untuk mempunyai semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian dalam mengatasi persoalan secara bersama atau musyawarah dan keadilan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin atau kurang mampu.

Secara keseluruhan upaya pemerintah dalam menerapkan program Desaku Menanti adalah untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan yang dilaksanakan dengan berbagai cara. *Pertama* melalui pemilihan pendataan PMKS, pemilihan ini dilakukan oleh Dinas Sosial yang sudah dipersiapkan oleh Dinas Sosial. *Kedua*, merubah mental dari GEPENG untuk tidak kembali lagi kejalanan dan mau memulai hidup baru. Ketiga, adalah memberikan pelatihan berupa memasak dan juga kerajinan tangan guna memulai hidup baru nantinya di Desaku Menanti tepatnya di Kampung 1000 Topeng dan mampu membiayai kehidupan keluarganya. Keempat, menempatkan PMKS yang sudah dipilih oleh Dinas Sosial yang telah melewati beberapa tahapan yang dilakukan oleh Dinas Sosial di rumah yang telah dibangun oleh Dinas Sosial dan para Donatur yang telah membantu dan bekerja sama dalam pembangunan tersebut. Berkaitan dengan teori implementasi menurut Edward III, penerapan program Desaku Menanti sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Malang dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi masih belum berjalan dengan baik.

Pada pelaksanaan Program Desaku Menanti yang dimulai pada tahun 2016 hingga sekarang bahwa wisata yang telah di jalankan oleh warga binaan penuh dengan lika-liku dikarenakan masih banyaknya kekurangan yang belum diselesaikan oleh pihak Dinas Sosial untuk bisa menunjang dalam pariwisata di Kampung 1000 Topeng. Pada awal tahun 2018 kegiatan tersebut sudah memiliki peningkatan yang secara bertahap, baik dari penambahannya pelatihan dan juga penambahan Spot wisata yang baru dalam mengembangkan wisata di Kampung 1000 Topeng agar wisata tersebut akan selalu dikunjungi oleh masyarakat yang berwisata di Kampung 1000 Topeng di Kota Malang. []

“Kunjungan Kelembagaan : Membangun Jaringan dan Menambah Wawasan”

Oleh : Ni'matul Aulia

(Anggota Divisi Pendidikan dan Penalaran HIMAP UMM)

Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (HIMAP UMM) seakan-akan tidak pernah berhenti untuk terus produktif dalam mengadakan kegiatan kemahasiswaan dengan tujuan tercapainya Visi dan Misi dari HIMAP itu sendiri. Pada bulan Maret 2018 mendarat, HIMAP UMM akan merealisasikan salah satu program kerjanya yaitu *Study Excursion* (SE) atau yang biasa disebut dengan Kunjungan Kelembagaan. Kegiatan ini merupakan program tahunan yang diadakan 1 (satu) kali setiap tahunnya. Pada tahun ini pesertanya dikhususkan untuk Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Angkatan 2016.

SE bukan hanya sebatas kunjungan dan safari kelembagaan, SE juga bertujuan untuk menambah wawasan mahasiswa tentang kehidupan birokrasi pemerintahan secara nyata, bukan hanya melalui teori dan kajian yang didapat dalam kehidupan akademik saja. Di samping itu, diadakannya SE juga diharapkan dapat membangun jaringan antara Jurusan Ilmu Pemerintahan dengan lembaga-lembaga terkait yang akan dikunjungi. Pembangunan jaringan kelembagaan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Mahasiswa Ilmu Pemerintahan untuk melaksanakan magang riset pemerintahan di masa mendatang ataupun bekerja setelah sarjana nantinya.

Pelaksanaan SE Tahun 2018 ini juga dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pelanggaran hukum dan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan atau bahkan para Aparatur Sipil Negara. Bukan tidak mungkin, semakin tinggi jabatan yang dimiliki maka semakin besar pula peluang untuk melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang karena merasa mempunyai kekuasaan sehingga orang yang berada di bawah kekuasaannya tidak berani untuk menegur dan menghentikan apa yang ia perbuat. Tingginya kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para aparatur pemerintah selama tahun 2017 kemarin menjadi tolak ukur dan gambaran bahwa ternyata Peraturan Perundang-Undangan yang telah dibuat sebagai batasan terhadap kekuasaan pemerintah, hanya dianggap sebagai lembaran-lembaran pasal dan ayat saja. Hukum yang ada bukan berarti bersifat tidak

memaksa dan tidak mengikat seperti hakikat hukum sesungguhnya, tetapi kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum itulah yang dapat memberikan celah bagi para pemegang kekuasaan untuk berbuat curang dan sewenang-wenang.

Hal tersebut di atasnya juga memberikan gambaran bahwa pada dewasa ini para Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan maupun ASN mengalami penurunan kualitas, baik kualitas kerja, moral, etika dan lain sebagainya. Terutama bagi ASN, di masa sekarang sudah banyak ASN yang tidak berorientasi pada hak dan kewajiban utamanya sebagai pelayan masyarakat. Mereka menuntut haknya seperti gaji, tunjangan, penghargaan namun tidak diimbangi dengan melaksanakan kewajiban kepada masyarakat. Hal ini tidak mencerminkan aparatur pemerintah yang profesional dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Dilatarbelakangi hal tersebut di atas, SE Tahun 2018 ini mengangkat tema “Penguatan Konstitusi Negara untuk Mewujudkan *Zero Corruption dan Responsible Government*”. Melalui tema tersebut, HIMAP UMM ingin mengetahui strategi dan tindakan seperti apa yang akan dilakukan oleh Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPANRB), Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengembalikan eksistensi dan substansi dari Peraturan Perundang-Undangan serta untuk

membangun birokrasi pemerintahan yang berkualitas. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang nantinya mengikuti kegiatan ini juga diharapkan dapat terlibat secara aktif dalam diskusi bersama dengan lembaga-lembaga tersebut di atas, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan birokrasi pemerintahan di Indonesia. Selain itu, kunjungan ini juga dapat dijadikan pelajaran bagi mahasiswa kedepannya sebagai calon birokrat pemerintah agar dapat bertanggungjawab dengan tugas dan wewenangnya serta dapat bertindak secara profesional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



PROFIL DAN INFORMASI PENDAFTARAN PRODI ILMU PEMERINTAHAN

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

Visi Menjadikan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-UMM sebagai pusat pendidikan yang unggul dalam pengembangan ilmu serta praktik pemerintahan bertaraf internasional untuk mendukung terwujudnya *Effective Government* sebagai pengejawantahan nilai-nilai Islam.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan pola pikir, wawasan, dan keterampilan mahasiswa di bidang Ilmu Pemerintahan yang berorientasi pada pemerintahan daerah (*local government*) yang berdaya saing internasional.
2. Mengembangkan riset dan kajian Ilmu Pemerintahan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif (*effective government*).
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat sipil (*civil society*).
4. Meningkatkan jaringan kelembagaan yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi (TCI).
5. Meningkatkan kompetensi keilmuan dan keterampilan pemerintahan bagi mahasiswa agar berdaya saing internasional dan berakhlak mulia.

Tujuan Pembelajaran :

1. Menguasai dasar-dasar Ilmu Pemerintahan dan keterampilan dasar bidang Pemerintahan.
2. Mampu mengidentifikasi permasalahan di bidang Pemerintahan.
3. Mampu mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan pemerintahan secara komprehensif dan akurat.

4. Menguasai prinsip dasar demokrasi guna mewujudkan masyarakat sipil yang berdaya (*civil society*).
5. Memiliki kepekaan dan tanggung jawab etik dalam mengemban amanah sebagai ilmuwan dan praktisi Ilmu Pemerintahan.

Tempat Pendaftaran :

UPT PMB Universitas Muhammadiyah Malang
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 6514, Telp.0341-464318-19 Psw. 139.
Fax. 0341-460435, 460782. e-mail:pmb@umm.ac.id.

Pendaftaran on-line : pmb.umm.ac.id. call center: +62 341 463513.

Jalur Pendaftaran :

Program Jalur Undangan/ Jalur Prestasi & PMDK; Program Reguler; Program Beasiswa Khusus Yatim / Yatim-Piatu; Program Beasiswa PPUT; Program Transfer dan Alih Jenjang

Prosedur Pendaftaran :

- a. Mengisi biodata peserta secara *online* pmb.umm.ac.id
- b. Melakukan pembayaran secara transfer melalui BNI No. Rek. 6006002464 (Tidak menerima transfer pembayaran via ATM/SMS Banking/ e-Banking)
- c. Formulir cetak *online* dan semua berkas syarat pendaftaran dimasukkan dalam amplop coklat dan dikirim ke alamat: **UPT PMB Universitas Muhammadiyah Malang Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144**
- d. Pengiriman Berkas pendaftaran melalui pos dan *email*.